

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap badan, termasuk pemerintah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan ikhtisar tentang keadaan dan hasil kinerja badan tersebut. Pada intinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) (Moermahadi, 2017:1).

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek yang sangat penting bagi suatu wilayah daerah, karena keuangan merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan cermat serta mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat (Muhammad Din, 2022:1).

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya dapat memberikan informasi yang berguna bagi para penerima informasi untuk menilai akuntabilitas dan mengambil keputusan, termasuk keputusan ekonomi, sosial dan politik (Moermahadi, 2017:2). Untuk memastikan laporan keuangan yang berkualitas, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab dalam pembuatannya (Andres Putranta Sitepu, 2022:68). Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan

keputusan. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas (Pieter Leunupun, dkk., 2023).

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang baik terus meningkat. Oleh karena itu, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang baik mencerminkan apakah pemerintah tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah wajib menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rapika Anwar, 2021:3-4). Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan (Ely Suhayati & Sri Dewi Anggadini, 2014:16).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Penilaian ini terbagi menjadi empat kategori opini, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*, opini tersebut mengindikasikan laporan keuangan telah disajikan secara memuaskan sesuai standar. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*, opini ini mengindikasikan laporan keuangan telah disajikan wajar namun memiliki beberapa bagian yang tidak memenuhi standar. Opini Tidak Wajar (TW) atau *Adverse Opinion*, opini ini mengindikasikan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar serta adanya penolakan untuk perbaikan. Dan menolak memberikan pendapat, opini mengindikasikan ketidakmampuan auditor untuk memberikan kesimpulan karena batasan pemeriksaan (Daffa A & Fatimah, 2023).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Pada hakikatnya perlunya penggunaan sistem informasi akuntansi yang efektif untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Proses pengelolaan keuangan secara manual memakan waktu yang lama karena ketidakseragaman format laporan keuangan dan potensi kesalahan yang lebih tinggi, sehingga penting untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan lancar dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dengan cepat dan tepat waktu (Rana Khanza, 2023).

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan informasi yang akurat terkait dengan laporan keuangan entitas mereka. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi akuntansi yang valid dan relevan. Implementasi sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah meliputi pembuatan laporan keuangan yang menggunakan serta memanfaatkan sistem informasi (Dian Priatiningsih & Fangela Myas Sari, 2022).

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang diciptakan untuk mendukung pengelolaan informasi keuangan dan akuntansi dalam suatu organisasi (Anak Agung Gede & Khas Sukma, 2023:4-5). Sistem informasi akuntansi sebagai bagian dari infrastruktur sistem informasi, seharusnya memberikan nilai tambah yang besar kepada pengguna. Keberadaan sistem informasi akuntansi merupakan suatu investasi yang memberikan manfaat bagi entitas, (Sri Mulyani, 2021:6).

Sistem informasi akuntansi dibuat sebagai langkah konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan

tujuan menghasilkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat dipercaya dan disampaikan secara tepat waktu sistem akuntansi dirancang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Ingelia Puspita & Rudy Iskandar, 2021:18).

Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta N (2021:8) sistem informasi akuntansi memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk memberikan dukungan dalam menjalankan operasi sehari-hari untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan memenuhi kewajiban pertanggung jawaban, dan mengurangi tingkat ketidakpastian.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan yang optimal agar dapat mempermudah pencapaian semua tujuan yang telah memungkinkan penyajian laporan yang berkualitas (Widatul Azizah & Heri Yanto, 2022). Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah juga ditentukan oleh seberapa efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan (Sitti Mispa & Nuramal, 2022).

Pengendalian internal yang baik akan membuat kualitas laporan keuangan lebih baik. Sistem pengendalian internal bisa mencegah hal yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga membuat organisasi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi lebih bagus (Hartono & Ramdany, 2020).

Menurut Nyoman Putri dan Anak Agung (2023) kinerja yang efektif dan efisien dari pengendalian internal sangat penting karena berperan besar dalam operasional organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan

menerapkan pengendalian internal, karyawan organisasi akan lebih mudah dalam menjalankan tugas mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Pengendalian internal adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, struktur pengendalian internal merupakan serangkaian langkah menyeluruh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencapai tujuan yang berhubungan erat dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional (I Gusti Ayu, 2021:157).

Pengendalian internal memberikan keyakinan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan undang-undang (Sri Adella Fitri & Yaya Rahimi, 2023:185). Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan dalam proses pengelolaan data akuntansi dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya bagi perusahaan atau pemerintahan dalam mengambil keputusan yang tepat (Sri Adella Fitri & Yaya Rahmini, 2023:189).

Bukan hanya itu, faktor lain yang mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta menggunakan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat (Riska Riski A, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintah, terutama bagi para pengambil keputusan hal ini

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi sangat membantu dalam manajemen laporan keuangan dengan efektif dan efisien serta menjamin bahwa laporan keuangan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Gebby Berlian & Aloysius Harry, 2022).

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini dan pemanfaatannya yang luas terbuka peluang bagi untuk mengelola, mengakses. Dan memanfaatkan informasi keuangan daerah dengan cepat dan akurat. Dengan teknologi, informasi keuangan menjadi berkualitas yaitu akurat tepat waktu dan relevan (Ayu Kristina, dkk., 2020).

Menurut Andi Muh Akbar dan Lalu Puji Indra (2023:1) teknologi memfasilitasi pengelolaan data dengan cepat dan efisien, serta memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi yang mudah dilakukan di berbagai waktu dan lokasi.

Pada awalnya tujuan teknologi informasi didasari oleh kebutuhan sederhana yang ternyata tidak hanya memfasilitasi kehidupan individu, tetapi juga menyederhanakan proses yang kompleks seperti administrasi pemerintah (Aditya Ahmad F, dkk., 2023:15). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Orinton Purba (2023:82) , teknologi informasi memungkinkan pemerintah dan masyarakat memanfaatkan sistem digital yang efisien dan otomatis dalam mengelola berbagai proses administrasi dan layanan publik.

Adapun fenomena mengenai Kualitas Laporan Keuangan, pada tahun 2022 Arif Agus selaku Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkap

beberapa permasalahan yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, terdapat sejumlah temuan masalah yang perlu diperhatikan. Masalah tersebut antara lain adalah pengelolaan dan penatusahaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum tertib, kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada dua SKPD serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan penatausahaan piutang pajak daerah yang belum memadai, hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang harus segera diperbaiki serta hal ini juga yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi kurang andal (Jabar BPK, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, terdapat temuan masalah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang menyebabkan laporan keuangan yang kurang andal. Sementara itu dalam praktiknya Pemerintah Kota Cimahi sendiri sudah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cimahi bertujuan untuk memudahkan dan mendukung dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Pemerintah Kota Cimahi juga sudah menerapkan Pengendalian Internal, Pengendalian Internal diterapkan untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah, pelaporan keuangan yang andal, menjaga aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Teknologi Informasi, Pemerintah Kota Cimahi telah menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi baik dari segi komputer maupun jaringannya.

Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh La Tansa Mashiro (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta sistem informasi akuntansi yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian menurut Anas Bin Malik, dkk., (2023), menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mawar Maulana Nur, dkk. (2023), sistem informasi akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan dikarenakan kondisi SDM yang sudah ada dan pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya pada penelitian Ni Komang Ayu Mahartini, dkk. (2021), pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febriana Hadist, dkk., (2022) menyatakan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jefry Gasper (2019) teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka *research gap* atau kesenjangan penelitian ini yakni hasil penelitian yang tidak konsekuen, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INOFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang menyebabkan laporan keuangan yang kurang andal, meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi secara efektif.
2. Adanya permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang menyebabkan laporan keuangan yang kurang andal, meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menerapkan pengendalian internal.
3. Adanya permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang menyebabkan laporan keuangan yang kurang andal, meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

### **1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **1.5 Manfaat/Kegunaan**

### **1.5.1 Manfaat/Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang terlibat, pemerintah daerah dapat meningkatkan proses akuntansi, memaksimalkan pengendalian internal dan meningkatkan teknologi informasi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **1.5.2 Manfaat/Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya dan menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan.